

# Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) Audited

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

Jl Raya Padang–Painan KM 16 Kota Padang

Sumatera Barat

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PMK No.222/PMK.05/2016 Tentang perubahan PMK No.177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang, 31 Desember 2023  
Kepala Pelabuhan



Widodo, S.Pi.,M.Sc  
NIP 197101071999031002

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	35
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
F. Pengungkapan Penting Lainnya	42
VI. Lampiran dan Daftar	

---

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023(Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, 31 Desember 2023

Kepala Pelabuhan,



Widodo, S.Pi.,M.Sc

NIP 197101071999031002

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahunan TA 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada sampai dengan bulan Desember 2023 di TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.662.123.411,- atau mencapai 128 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.079.149.000,-

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2023 TA 2023 adalah sebesar Rp16.193.142.155,- atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp16.305.580.000,-.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp167.352.159.429,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp100.948.845,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp166.490.125.635,-; Properti Investasi sebesar Rp613.644.781,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp147.440.168,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp264.924.726,- dan Rp167.087.234.703,-

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas adalah Rp167.352.159.429,-

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.657.586.308,- sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp19.290.930.875,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp16.633.344.567,- Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing Surplus sebesar Rp235.042.932,- dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp16.398.301.635,-.

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp166.855.681.920,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp16.398.301.635,- kemudian ditambah dengan Koreksi nilai aset non revaluasi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp2.916.584.674,- dan Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp0 serta Transaksi Antar Entitas sebesar Rp13.713.269.744,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp167.087.234.703,-.

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI	
<b>PENDAPATAN</b>				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.079.149.000	2.662.123.411	128,04
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.079.149.000</b>	<b>2.662.123.411</b>	<b>128,04</b>
<b>BELANJA</b>	B.2.			
<b>Belanja Operasi</b>				
Belanja Pegawai	B.3	7.133.574.000	7.073.501.216	99,16
Belanja Barang	B.4	7.956.726.000	7.907.891.625	99,39
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>15.090.300.000</b>	<b>14.981.392.841</b>	<b>99,28</b>
<b>Belanja Modal</b>				
Belanja Tanah	B.6	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	1.215.280.000	331.404.930	27,27
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	470.000.000	38,67
Belanja Jalan Irigasi Jaringan	B.9	-	410.694.384	33,79
Belanja Modal lainnya	B.10	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>1.215.280.000</b>	<b>1.212.099.314</b>	<b>99,74</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>16.305.580.000</b>	<b>16.193.492.155</b>	<b>99,31</b>



**PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**  
**NERACA**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	159.000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Pendapatan yang masih harus diterima	C.4	93.691.915	65.095.840
Piutang PNB	C.5	206.732.150	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.6	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.8	(205.235.073)	-
PIUTANG BUKAN PAJAK(NETTO)		1.497.077	-
Belanja Dibayar di Muka	C.9	-	-
Persediaan	C.10	7.097.930	1.220.000
Persediaan yang belum Diregister		-	-
Jumlah Aset Lancar		102.445.922	66.315.840
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.11	122.261.085.000	122.261.085.000
Peralatan dan Mesin	C.12	20.893.112.020	19.767.203.722
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(19.829.676.009)	(18.600.506.207)
<b>Peralatan dan Mesin(Netto)</b>		<b>1.063.436.011</b>	<b>1.166.697.515</b>
Gedung dan Bangunan	C.13	24.105.419.190	19.914.485.329
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(5.914.991.696)	(4.000.758.918)
<b>Gedung dan Bangunan(Netto)</b>		<b>18.190.427.494</b>	<b>15.913.726.411</b>
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.14	47.895.133.900	47.608.781.584
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		(22.981.721.770)	(20.166.182.876)
<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan(Netto)</b>		<b>24.913.412.130</b>	<b>27.442.598.708</b>
Aset Tetap Lainnya	C.15	61.765.000	2.200.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.16	-	59.565.000
Jumlah Aset Tetap		166.490.125.635	166.786.307.634
<b>Properti Investasi</b>			
Properti Investasi		738.290.000	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		(124.645.219)	-
<b>JUMLAH Properti Investasi</b>		<b>613.644.781</b>	
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.17	20.900.000	20.900.000
Aset Lain-Lain	C.18	3.907.190.704	3.907.190.704
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.19	(3.780.650.536)	(3.775.234.607)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		-	-
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>147.440.168</b>	<b>152.856.097</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>167.353.656.506</b>	<b>167.005.479.571</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga I	C.20	118.871.230	92.863.401
Utang yang belum ditagihkan	C.21	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.22	146.053.496	116.499.250
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		264.924.726	209.362.651
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>264.924.726</b>	<b>209.362.651</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.24	167.088.731.780	166.796.116.920
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>167.088.731.780</b>	<b>166.796.116.920</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>167.353.656.506</b>	<b>167.005.479.571</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Des 2023	31 Des 2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2.657.586.308	1.774.709.127
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>		<b>2.657.586.308</b>	<b>1.774.709.127</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	7.071.996.616	6.761.570.900
Beban Persediaan	D.3	313.098.490	321.005.945
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.072.494.257	3.555.808.089
Beban Pemeliharaan	D.5	1.263.583.477	1.360.713.368
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.286.319.050	1.434.623.447
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	4.281.934.385	4.531.785.308
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	7.523	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>		<b>19.289.433.798</b>	<b>17.965.507.057</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(16.631.847.490)</b>	<b>(16.190.797.930)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.12	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		235.042.932	32.404.951
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>235.042.932</b>	<b>32.404.951</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(16.396.804.558)</b>	<b>(16.158.392.979)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNBPNP	D.13	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(16.396.804.558)</b>	<b>(16.158.392.979)</b>

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Des 2023	31 Des 2022
EKUITAS AWAL	E.1	166.855.681.920	169.655.985.171
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(16.396.804.558)	(16.158.392.979)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	2.916.584.674	1.291.161
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	2.916.584.674	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	1.291.161
JUMLAH		<b>2.916.584.674</b>	1.291.161
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	13.713.269.744	13.356.798.567
EKUITAS AKHIR	E.5	<b>167.088.731.780</b>	<b>166.855.681.920</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus berawal dari Sumatera Fisheries Development Project (SFDP) yang dimulai sejak tahun 1981 dan selesai tahun 1989 dengan sumber dana berasal dari pinjaman Bank Pembangunan Asia (ADB Loan 474-INO) sebesar US\$ 9,3 Juta dan dana pendamping setiap Tahun Anggaran dari APBN. Selanjutnya kegiatan SFDP berakhir dan dilanjutkan oleh UPT Direktorat Jenderal Perikanan yang disebut dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus berdasarkan SK. Mentan Nomor : 558/Kpts/OT.210/8/90 tanggal 4 Agustus 1990 (Vide Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara Nomor : B.590/I/90 tanggal 2 Juli 1990) dengan status eselon III/b.

Perkembangan selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 Mei 2001 status Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus meningkat menjadi eselon II/b dengan klasifikasi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus berdasarkan SK. Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 26.I/MEN/TAHUN 2001 (Vide Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 86/M.PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001).

Keberadaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus di Kota Padang memudahkan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan melaut seperti BBM, air tawar, es, ransum, maupun logistik lainnya.

Visi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah :

“Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Ekonomi Perikanan Indonesia Bagian Barat”

Secara harfiah, visi tersebut mengandung arti bahwa dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan sentral kegiatan industri perikanan terpadu yang dimulai dari kegiatan prapanen, panen, pascapanen dan pemasaran produk perikanan, sehingga pada akhirnya kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan dan sekaligus sebagai cikal bakal pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional.

Istilah Indonesia Bagian Barat diartikan sebagai pernyataan wilayah administratif yang terkena dampak positif dari aktivitas ekonomi perikanan yang dilakukan dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Misi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah :

1. Meningkatkan investasi penangkapan dan pengolahan hasil perikanan
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha perikanan
3. Pembinaan usaha masyarakat perikanan, peningkatan kemampuan SDM perikanan serta pembinaan keselamatan pelayaran
4. Meningkatkan peran pusat informasi pelabuhan perikanan (PIPP)
5. Mensejahterakan masyarakat nelayan sekitar pelabuhan perikanan dan nelayan Sumatera Barat pada umumnya

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 957/KMK.05/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang pelaksanaan *Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi* Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mengimplementasikan aplikasi *Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi(SAKTI)* dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sejak 1 Januari 2022. Pencatatan secara transaksional berbasis akrual berdasarkan dokumen yang muncul pada saat transaksi dilakukan. Pada aplikasi SAKTI, modul General Ledger dan Pelaporan menggantikan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) dalam penyusunan Laporan Keuangan. Modul Aset Tetap menggantikan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Modul Persediaan menggantikan aplikasi Persediaan.

Perubahan mendasar pada Aplikasi SAKTI dalam rangka penyusunan laporan keuangan, yaitu terdapat *Open-Closing periode* untuk melakukan buka-tutup periode pada saat periode transaksi dinyatakan berakhir. Sebelum melakukan tutup buku, operator Modul General Ledger dan Pelaporan melakukan Validasi seluruh transaksi dan memposting jurnal yang timbul dari modul terkait lainnya (Modul Administrasi, Modul Anggaran, Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Pembayaran dan Modul Piutang).

Pada Closing periode Modul Akuntansi dan Pelaporan, secara otomatis modul lainnya tutup buku pada periode yang sama. Periode akuntansi pada aplikasi SAKTI terdiri dari 12 periode normal (Januari – Desember), periode *Unaudited*, dan periode *audited*.

#### *Basis Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### *Dasar Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang merupakan entitas pelaporan dari Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

##### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

##### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan

/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan



selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

**Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga

wajar.

- Pengakuan aset tetap mengacu pada PMK No.181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan Aset tetap renovasi peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan atau Aset tetap lainnya yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Piutang Jangka Panjang*

### **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan

aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### *Aset Lainnya*

#### **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

#### *Kewajiban*

#### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek
 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang
 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih*

### **(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan

Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan  
Aset Tetap*

#### **(9) Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis Akrua  
Pertama kali*

#### **(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Rp2.662.123.411,-

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2,662,123,411,- atau 128 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2,079,149,000,-. Pendapatan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai TUSI, Pendapatan jasa Pelabuhan Perikanan, Pendapatan Jasa lainnya, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah serta Pendapatan Anggaran Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
425131-Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Dan Bangunan	-	22.314.673	1,31
425151-Pendapatan penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai TUSI	373.362.000	572.019.636	33,53
425621-Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	1.705.787.000	2.064.051.170,00	121,00
425911-Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu		1.204.632	
425912-Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu	-	2.533.300	0,15
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.079.149.000</b>	<b>2.662.123.411</b>	<b>128,04</b>

(Sumber data Simponi)

Pendapatan sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan(425131) merupakan Pendapatan yang diperoleh dari Pungutan sewa Rumah Dinas yang ditempati pegawai, Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai TUSI(425151) adalah Pendapatan yang diperoleh dari Penggunaan atau Pengelolaan BMN seperti Jasa Bengkel, Jasa Dock, Jasa Forklif, Sewa Bangunan, Sewa Lahan/tanah, Sewa Mess, Sewa Tangki BBM, Sewa Alat, Jasa Penggunaan Kendaraan berpendingin, dan Jasa Penggunaan Dump Truck. Pendapatan jasa Pelabuhan Perikanan(425621) merupakan Pendapatan yang diperoleh dari Jasa Kebersihan, Jasa Tambat, Pas Bulanan, Pas Harian, Penjualan Air, dan Jasa Instalasi Air Laut Bersih. Pendapatan Jasa Lainnya(425699) adalah pendapatan yang diperoleh dari jasa Listrik. Pendapatan Lain-lain(425911) merupakan pendapatan/Penerimaan kembali

belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu .

*Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI 31 Des 2023	REALISASI 31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah,gedung, dan Bangunan	22.314.673	4.092.900	445,20
Pendapatan penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai TUSI	572.019.636	834.506.171	-31,45
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	2.064.051.170	1.229.899.009	67,82
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	1.204.632	32.103.868	
Penerimaan kembali belanja bahan TAYL	2.533.300	-	
Pendapatan Lain-lain	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>2.662.123.411</b>	<b>2.100.601.948</b>	<b>26,73</b>

*Realisasi Belanja  
Negara  
Rp16.193.492.155,-*

## B.2. Belanja

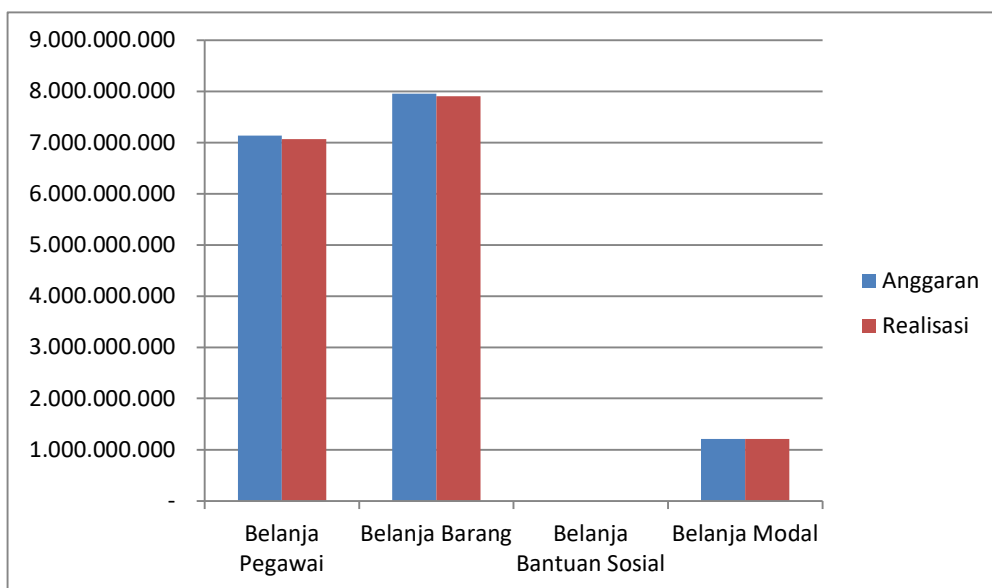
Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp16,193,492,155,- atau 99% dari anggaran belanja sebesar Rp16,305,580,000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2023*

URAIAN	TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	7.133.574.000	7.073.501.216	99,16
Belanja Barang	7.956.726.000	7.907.891.625	99,39
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	1.215.280.000	1.212.099.314	99,74
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>16.305.580.000</b>	<b>16.193.492.155</b>	<b>99,31</b>
Pengembalian Belanja	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>16.305.580.000</b>	<b>16.193.492.155</b>	<b>99,31</b>



Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



*Belanja Pegawai  
Rp7.073.501.216,-*

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.073.501.216,- dan Rp6.671.570.900,- Realisasi belanja pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,0 persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan gaji berkala, Pengangkatan PNS dan PPPK baru, kenaikan pangkat pegawai serta adanya pegawai yang baru di mutasi ke PPS Bungus.

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK (TURUN) %
511111-Belanja Gaji pokok PNS	2.384.828.780	3.466.950.277	(31,21)
511121-Belanja Tunjangan Suami/Isteri	182.134.150	103.664.127	-
511122-Belanja Tunjangan anak PNS	51.631.482	93.963.700	-
511123-Belanja Tunjangan Struktural	35.910.000	9.921.000	261,96
511124-Belanja Tunjangan fungsional PNS	186.340.000	3.087.071.796	(93,96)
511125-Belanja Tunjangan PPH PNS	6.491.247		
511126-Belanja tunjangan beras PNS	134.990.880		
511129-Belanja uang makan PNS	325.113.000		
511151-Belanja tunjangan umum PNS	76.320.077		
511611-Belanja Gaji pokok PPPK	205.313.500		
511621-Belanja tunjangan suami/Isteri PPPK	15.226.220		
511622-Belanja Tunjangan anak PPPK	4.262.240		
511619-Belanja pembulatan gaji PPPK	3.923		
511624-Belanja tunjangan fungsional PPPK	32.910.000		
511625-Belanja tunjangan beras PPPK	15.256.177		
511628-Belanja uang makan PPPK	35.258.000		
512211-Belanja uang lembur	6.375.000		
512414-Belanja Khusus/Tunjangan Kinerja PPPK	294.228.931		
512411-Belanja Khusus Tunjangan/kegiatan	3.080.907.609		
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>7.073.501.216</b>	<b>6.761.570.900</b>	<b>4,61</b>
Pengembalian Belanja Pegawai		(3.225.319)	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>7.073.501.216</b>	<b>6.758.345.581</b>	<b>4,66</b>

*Belanja Barang*  
*Rp7.907.891.625,-*

#### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7,907,891,625,- dan Rp6.620.735.813,- Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan dari anggaran yang disediakan sebesar 0,1% dari Realisasi Belanja Barang pada TA 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan belanja barang operasional, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dalam negeri guna mendukung program kkp.

*Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	576.291.485	1.062.082.406	(45,74)
Belanja Barang Non Operasional	510.370.760	655.953.855	(22,19)
Belanja Barang Persediaan	313.431.080	320.338.345	(2,16)
Belanja Jasa	2.985.832.012	1.787.024.392	67,08
Belanja Pemeliharaan	1.255.777.137	1.360.713.368	(7,71)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.266.189.151	1.434.623.447	57,96
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>7.907.891.625</b>	<b>6.620.735.813</b>	<b>19,44</b>
Pengembalian Belanja	-	(274.620)	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>7.907.891.625</b>	<b>6.620.461.193</b>	<b>19,45</b>

Belanja Bantuan  
Sosial  
Rp0

### B.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK (TURUN) %
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Belanja Modal  
Tanah  
Rp0

### B.6 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 2023	REALISASI 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin  
Rp680.320.998,--

### B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp680.320.998,- mengalami peningkatan sebesar 807,13% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp74.997.150,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal  
TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	680.320.998	74.997.150	807,13
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	48.951.000	183.617.500	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>729.271.998</b>	<b>258.614.650</b>	<b>181,99</b>
Pengembalian	-	-	-

Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan  
Rp47.000.000,-

### B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp47,000,000,- dan Rp168.436.500.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
TA 2023 dan TA 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.000.000	168.436.500	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	149.475.000		-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>196.475.000</b>	<b>168.436.500</b>	<b>-</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>196.475.000</b>	<b>168.436.500</b>	<b>-</b>

Belanja Modal  
Jalan, Irigasi,  
dan Jaringan Rp0

### B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan  
TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2023	T.A. 2022	NAIK (Turun) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	286.352.316	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>286.352.316</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>286.352.316</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Belanja Modal  
LainnyaRp0*

#### **B.10 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada alokasi anggaran pada TA 2023 untuk Belanja Modal Lainnya.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0,-

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*

Keterangan	31 Des 2023	31 Des 2022
Uang di Rekening Bank	-	-
Uang Tunai di brankas	-	-
Uang muka perjalanan dinas	-	-
BP-LS Bendahara	-	-
BP-UP	-	-
Kuitansi UP	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp159.000,-

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp159.000,- dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai yang belum disetor diakhir pelaporan berupa penerimaan pas masuk pada akhir tahun yang belum disetor ke kas negara yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan*

Keterangan	31 Des 2023	31 Des 2022
Rekening Bank	-	-
Uang Tunai	159.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>159.000</b>	<b>-</b>

Kas Lainnya dan Setara  
KasRp0

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara

Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas*

Jenis	31 Des 2023	31 Des 2022
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	-	-
Pajak PPh yang belum disetor	-	-
Saldo rekening bank berupa biaya perjalanan dinas pegawai yang belum dibagikan	-	-
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Pendapatan yang masih harus diterima Rp93.691.915,-,-*

#### C.4 Properti Investasi

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan bukan pajak yang mesti diterima pada Tahun berjalan namun belum dibayarkan sampai akhir 2023 pada PPS Bungus per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp93.691.915,- dan Rp65.095.084,-.

Keterangan	31 Des 2023	31 Des 2022
Pendapatan yang masih harus diterima	93.691.915	65.095.840
		-
<b>Jumlah</b>	<b>93.691.915</b>	<b>65.095.840</b>

*Piutang Bukan Pajak Rp206,732,150,-*

#### C.5 Piutang PNBPN

Saldo Piutang PNBPN per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp206,732,150,- dan Rp0.

*Rincian Piutang Bukan Pajak*

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Piutang PNBPN	206.732.150	-
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>206.732.150</b>	<b>-</b>

Piutang PNBPN pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan pendapatan yang telah dilaporkan perolehannya dalam bentuk kuitansi tagihan ke pengguna jasa Pelabuhan

*Bagian Lancar Tagihan TP/TGR*

#### C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti

Rp0

### Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR*

No	Nama	31 Des 2023	31 Des 2022
-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

Bagian Lancar TPA

Rp0

### C.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA*

No	Nama	31 Des 2023	31 Des 2022
-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

Penyisihan Piutang Tak

Tertagih – Piutang

Jangka Pendek

Rp205,235,073,-

### C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp205,235,073,- dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan/macetnya piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Belanja Dibayar di Muka

Rp0

### C.9 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah



tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka*

Jenis	31 Des 2023	31 Des 2022
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Persediaan*  
Rp7.097.930,-

### C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp7.097.930,- dan Rp1.220.000. Sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Bulan Desember 2022 Nomor : /PPSB/PL.100/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan*

Persediaan	31 Des 2023	31 Des 2022
Barang Konsumsi	7.097.930	1.220.000
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.097.930</b>	<b>1.220.000</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Pada bulan pelaporan tidak terdapat Persediaan yang belum diregister.

*Tagihan TP/TGR*  
Rp0

### C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita

oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TP/TGR*

No	Debitur	31 Des 2023	31 Des 2022
-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

TPA  
Rp0

### C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA*

No	Debitur	31 Des 2023	31 Des 2022
-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih – Piutang  
Jangka Panjang  
Rp0

### C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Tanah  
Rp122.261.085.000

### C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp122.261.085.000 dan Rp122.261.085.000 Mutasi nilai tanah selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>122.261.085.000</b>
Mutasi tambah:	
Koreksi nilai	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>122.261.085.000</b>

Koreksi nilai tanah sebesar Rp0 berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tanah*

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	140.830 m2	Jl. Raya Padang-Painan KM 16 Padang	95.834.815.000
2	35.770 m2	Jl. Raya Padang-Painan KM 16 Padang	26.426.270.000
<b>Jumlah</b>			<b>122.261.085.000</b>

Aset tanah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus berada di Labuhan Tarok, Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Luas tanah adalah sebesar 176.600 m2. Dari total luas tersebut, 140.830 m2 sudah bersertifikat dengan nomor 1276/89/90.- Tanggal sertipikat 20 Juli 1989 serta kode B.8037261 dan status pemegang haknya sudah dialihnamakan dari semula Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian menjadi Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tanah seluas 35.770 m2 sudah memperoleh hak pengelolaan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 102/HPL/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 18 Juli 2017.

*Peralatan dan Mesin  
Rp20.893.112.020,-*

### **C.15 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp20.893.112.020,- dan Rp19.767.203.722,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>19.767.203.722</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	819.108.298
Transfer masuk	306.800.000
Mutasi kurang:	0
Reklas	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>20.893.112.020</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-19.522.876.009
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>1.370.236.011</b>

Penambahan nilai peralatan dan Mesin berasal dari Pembelian menggunakan akun 53 senilai Rp819.108.298,- dan Perolehan/Pendapatan lainnya senilai Rp306.800.000,-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan Bangunan*  
Rp24.105.419.190,-

#### **C.16 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp24.105.419.190,- dan Rp19.914.485.329,-. Tidak ada transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada periode pelaporan ini dengan rincian sebagai berikut.

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>19.914.485.329</b>
Mutasi tambah:	-
Transfer Masuk	-
Koreksi nilai	4.190.933.861
Mutasi kurang:	-
Koreksi nilai	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>24.105.419.190</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(5.914.991.696)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>18.190.427.494</b>

*Jalan, Jembatan, Irigasi,  
dan Jaringan*  
Rp47.895.133.900,-

#### **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp47.895.133.900,- dan Rp47.608.781.584,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada periode pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>47.608.781.584</b>
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi	286.352.316
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>47.895.133.900</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(22.981.721.770)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>24.913.412.130</b>

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap Lainnya*  
*Rp61,765,000,-*

### **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, Jembatan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp61.765.000,- dan Rp2.200.000. Aset tetap tersebut berupa gambar dinding figura master plan dan Properti Investasi berupa bangunan kios BAP. Mutasi tambah aset tetap lainnya terjadi setelah penetapan kios BAP direklas jadi Properti Investasi untuk periode ini sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>61.765.000</b>
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>61.765.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>61.765.000</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi Dalam*  
*Pengerjaan*  
*Rp0,-*

### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0, dan Rp59.565.000. Konstruksi dalam pengerjaan adalah Aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan atau proses perolehannya belum selesai pada akhir periode akuntansi. KDP ini berupa biaya perencanaan.

Konstruksi dalam pengerjaan ini telah memasuki tiga tahun anggaran namun belum ada tindak lanjut terhadap hal ini.

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp(48.726.389.475)

## C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(48.726.389.475) dan Rp(42.767.448.001). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	20.586.312.020	- 19.829.676.009	756.636.011
2	Gedung dan Bangunan	24.105.419.190	- 5.914.991.696	18.190.427.494
3	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	47.895.133.900	- 22.981.721.770	24.913.412.130
4	Aset Tetap Lainnya	2.200.000	0	2.200.000
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>92.589.065.110</b>	<b>-48.726.389.475</b>	<b>43.862.675.635</b>

Properti Investasi  
Rp738.290.000,-

## C.21 Properti Investasi

Properti Investasi adalah Properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, Nilai Properti Investasi 31 Desember 2023 adalah Rp738.290.000,-

Properti Investasi periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 pada Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah sebesar Rp 738.290.000,00 (*Tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah*) dengan kuantitas sebanyak 2 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari :

Nilai awal periode 01 Januari 2023 sebesar Rp 0 (*Nol rupiah*) sebanyak 0 unit;  
Nilai Mutasi Bertambah sebesar Rp 738.290.000,00 (*Tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dengan Kuantitas sebanyak 2 Unit;  
Nilai Mutasi Berkurang sebesar Rp 0 (*Nol rupiah*) dengan Kuantitas sebanyak 0 Unit

Aset Tak Berwujud  
Rp20.900.000

## C.22 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp20.900.000 dan Rp20.900.000. berupa Software CD

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus berupa *software berbentuk CD* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada periode pelaporan.

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>20.900.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>20.900.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(20.900.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>-</b>

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

### Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Microsoft Office dan Antivirus Software	20.900.000
<b>Jumlah</b>	<b>20.900.000</b>

Aset Lain-Lain  
Rp3.907.190.704

## C.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp3.907.190.704 dan Rp3.907.190.704. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Tidak terdapat mutasi aset lain-lain dalam periode pelaporan.

<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>3.907.190.704</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
<b>Mutasi kurang:</b>	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>3.907.190.704</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(3.780.650.536)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>126.540.168</b>

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan  
dan Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp(3.780.650.536)

### C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(3,780,650,536) dan Rp(3,775,234,607). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	20.900.000	(20.900.000)	-
Aset Lain-lain	3.907.190.704	(3.759.750.536)	147.440.168
<b>Jumlah</b>	<b>3.928.090.704</b>	<b>(3.780.650.536)</b>	<b>147.440.168</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN  
Rp0,-

### C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada Pihak  
Ketiga  
Rp118.871.230,-

### C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp118.871.230,- dan Rp92.863.401,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) berupa pembayaran tagihan Listrik dan Telepon untuk pemakaian bulan Desember 2022. Adapun rincian Utang Pihak



Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja barang yang masih harus dibayar	112.474.336	Beban Langganan Listrik
Belanja barang yang masih harus dibayar	6.396.894	Beban Langganan telepon
	-	
<b>Total</b>	<b>118.871.230</b>	

*Pendapatan Diterima di Muka*  
Rp146.053.496,-

### C.25 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp146,053,496,- dan Rp116.499.250. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa sewa tanah dan atau bangunan yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun sesuai dengan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Nomo :4692/DPT.3/PL.210.D3/X/2006 dengan PT. Dempo Andalas Samudera dan telah di Adendum dengan Nomor: 1127/DPT.3/PL.210.D3/III/2007 tanggal. 20 Maret 2007 Perjanjian ini berlaku selama 20 tahun. Dan PT. Dani Tama Mina dengan masa penggunaan selama 5 Tahun dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah
PT Dempo Andalas Samudera	Rp 22.780.000
Kontrak Kkios dan lain-lain	Rp 66.153.996
PT DANITAMA MINA	Rp 57.119.500
<b>Total</b>	<b>146.053.496</b>

*Ekuitas*  
Rp167.088.731.780,-

### C.26 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp167,088,731,780,- dan Rp166.855.681.920,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB  
Rp2.657.586.308,-

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2,723,740,304,- dan Rp1.774.709.127,-  
Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak  
31 Des 2023 dan 31 Des 2022*

URAIAN	31 Des 2023	31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
425131/ Pendapatan sewa tanah, Gedung, dan	22.314.673	13.314.900	-
425151/Pendapatan Penggunaan Sarana dan P	542.465.390	443.882.035	-
425621/Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	2.092.806.245	1.317.512.192	58,85
<b>Jumlah</b>	<b>2.657.586.308</b>	<b>1.774.709.127</b>	<b>49,75</b>

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari penjualan air untuk kapal perikanan, sewa tanah, gedung/bangunan, dan jasa kepelabuhanan, pendapatan dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan TUSI serta pendapatan jasa lainnya.

Beban Pegawai  
Rp7.071.996.616,-

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7,071,996,616,- dan Rp6.761.570.900,-  
Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah(PPPK) yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pada tahun anggaran 2023 Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mempekerjakan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja(PPPK) sehingga untuk rincian gaji, honor, tunjangan, dan uang makan disajikan dalam laporan ini.

Beban Persediaan  
Rp313.098.490,-

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp313,098,490,- dan Rp321.005.945,-  
Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan

maupun tidak dipasarkan.

*Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2023	31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	313.098.490	321.005.945	(2,46)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>313.098.490</b>	<b>321.005.945</b>	<b>(2,46)</b>

*Beban Barang dan  
Jasa  
Rp4.072.494.257,-*

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4,072,494,257,- dan Rp3.555.808.089,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya meningkatnya beban keperluan sehari-hari perkantoran.

*Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023*

AKUN	BEBAN BARANG DAN JASA	31 Des 2023
521111	Beban Keperluan Perkantoran	233.617.025
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.794.060
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	154.908.000
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	182.972.400
521211	Beban Bahan	486.470.760
521213	Beban Honor Output Kegiatan	23.900.000
522111	Beban Langganan Listrik	813.902.674
522112	Beban Langganan Telepon	64.684.665
522151	Beban Jasa Profesi	35.150.000
522191	Beban Jasa Lainnya	2.072.094.673
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-
	<b>Jumlah</b>	<b>4.072.494.257</b>

Beban  
Pemeliharaan  
Rp1.263.583.477,-

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,263,583,477,- dan Rp1.360.713.368,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2023	31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
523111-Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	576.951.339,00	503.207.187,00	14,65
523121-Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	484.462.936,00	688.026.381,00	(29,59)
523133-Beban Pemeliharaan Jaringan	88.210.222,00	101.301.110,00	-
523119-Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	106.152.640,00	68.178.690,00	
593113-Beban Persediaan untuk pemeliharaan	332.590	-	#DIV/0!
595113-Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	7.473.750	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>1.263.583.477</b>	<b>1.360.713.368</b>	<b>(7,14)</b>

Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp2.286.319.050,-

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,286,319,050,- dan Rp1.434.623.447,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas karena berkurangnya frekuensi kegiatan rapat di luar kota.

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2022	31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
524111-Beban Perjalanan Biasa	1.802.487.143	908.987.313	98,30
524113-Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	111.860.635	114.655.000	(2,44)
524114-Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	34.250.000	56.220.982	(39,08)
524119-Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	337.721.272	354.760.152	(4,80)
<b>Jumlah</b>	<b>2.286.319.050</b>	<b>1.434.623.447</b>	<b>59,37</b>

Beban Barang  
untuk Diserahkan  
kepada Masyarakat  
Rp0

#### D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat  
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2022	31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

*Beban Bantuan  
Sosial Rp0*

#### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Rincian Beban Bantuan Sosial 31 Des 2023 dan 31 Des 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2022	31 Des 2021	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

*Beban Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp4.281.934.385,-*

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4,281,934,385,- dan Rp4.531.785.308,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Des 2023	31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
591211-Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	723.871.189	1.217.807.334	(40,56)
591111-Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	860.947.715	635.155.189	35,55
591312-Beban Penyusutan Irigasi	2.149.674.839	2.149.674.841	(0,00)
591311-Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	371.580.982	371.580.982	-
591313-Beban Penyusutan Jaringan	160.855.637	152.151.036	
592222-Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan	5.415.929	5.415.926	
591611-Beban Penyusutan Properti Investasi	9.588.094		
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>4.281.934.385</b>	<b>4.531.785.308</b>	(5,51)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-

Beban Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih  
Rp7.523,-

#### D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.523,- dan Rp0,-.

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Des 2023 dan 31 Des 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2023	31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	7.523	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.523</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Surplus /Defisit dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp235.042.932,-

#### D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pendapatan berupa Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Des 2023 dan 31 Des 2022*

URAIAN	31 Des 2022	31 Des 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	235.042.932	32.404.951	625,33
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	#DIV/0!
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>235.042.932</b>	<b>32.404.951</b>	<b>625,33</b>

Pos Luar Biasa  
Rp0

#### D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering

terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa 31 Des 2023 dan 31 Des 2022*

URAIAN	31 Des 2023	31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### Ekuitas Awal

Rp166.855.681.920

,-

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp166.855.681.920,- dan Rp169.655.985.171,-.

### Defisit LO

Rp(16.396.804.558)

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(16,396,804,558) dan Rp(16,158,392,979). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0

### E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

### Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

### Selisih Revaluasi

Aset Tetap Rp0

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

### Koreksi Aset Tetap

Non Revaluasi

Rp2.916.584.674,-

### E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2,916,584,674,- dan



Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya karena Reklas aset Gedung dan Bangunan, Barang berlebih hasil setelah revaluasi aset dan koreksi pencatatan berupa jalan komplek dan dermaga. Sesuai dengan jurnal pada buku besar akrual Sakti

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 31 Desember 2023*

Jenis Aset Tetap	Debet
Peralatan dan Mesin	Rp -
Gedung dan Bangunan	Rp -
Jalan, Irigasi, Jembatan dan jaringan	Rp -
Jumlah	Rp -
<b>Kredit</b>	Rp -
<b>Jumlah Nilai Koreksi</b>	<b>Rp -</b>

*Koreksi Lain-Lain  
Rp0-*

**E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp1.291.161. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Rincian Koreksi Lain-Lain*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Transaksi Antar  
Entitas  
Rp13,713,269,744,-*

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13,713,269,744,- dan Rp13.356.798.567,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas:

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-2.662.123.411,
Ditagihkan ke Entitas Lain	16.193.492.155,
Transfer Masuk	181.901.000,
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>13.713.269.744</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp(2.662.123.411) sedangkan DKEL sebesar Rp16.193.492.156,-

**E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp181.901.000,-

terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Internal KL	-
2	Persediaan	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>-</b>

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

**E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas

pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	-	-	Rp -
2	-	-	Rp -
<b>Total Pengesahan</b>			<b>Rp -</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
<b>Jumlah</b>			<b>Rp -</b>

Rincian Penerimaan Hibah Langsung per 31 Desember 2023 disajikan pada lampiran. *(Apabila ada)*

*Ekuitas Akhir*  
*Rp167.088.731.780*  
 ,-

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp167.088.731.780,- dan Rp166.855.681.920,--